

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental baik secara politis dan administratif, semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut maka penataan manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis, sangat diperlukan. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya.

Sebagian besar aset pemerintah adalah berbentuk aset tetap. Aset tetap dalam Peraturan Pemerintah tahun 2010 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap terdiri dari, yaitu: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Aset tetap lainnya dan (6) Konstruksi dalam pengerjaan. Dari sekian aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal

yang paling sering menjadi masalah yang berujung dengan perebutan hak milik.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Neraca adalah salah satu elemen penyusunan Laporan Keuangan daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus memperhatikan setiap aspek yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset dalam hal ini barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau tidak. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan apa saja yang menjadi Barang Milik Daerah (aset) yang ada di daerah masing-masing dan apakah Barang Milik Daerah tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan baik.

Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pasal 1 butir 11 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah”. BMD pada dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/SKPD. Dalam rangka menjamin tertib dalam penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua BMD yang diperoleh untuk ditetapkan status penggunaannya. Penetapan status penggunaan BMD oleh Gubernur/walikota/bupati. BMD berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya pengertian BMD berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

BMD meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :
  - a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
  - b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak.
  - c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
  - d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,

dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan peraturan tersebut, Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri itulah, Gubernur/Bupati/Walikota menyusun peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan BMD, serta peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah untuk provinsi/kabupaten/kota masing-masing.

Pelaksanaan pengelolalaan BMD berdasarkan pada azas sbb :

1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja

perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Salah satu bentuk pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan yang berpotensi untuk Boyolali adalah sewa. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Latar belakang penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai: “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Daerah Kabupaten Boyolali”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Daerah Kabupaten Boyolali”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Daerah Kabupaten Boyolali.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas,manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan pustaka yang dapat memberikan saran-saran pada

pengembangan Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Serta sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sewa barang milik daerah.

## 2. Manfaat Pratis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pembantu pemanfaatan barang dalam pengelolaan barang milik daerah.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai dalam pemanfaatan sewa barang milik daerah di Kabupaten Boyolali.